



PENERAPAN *COMMUNITY DEVELOPMENT* PADA PROGRAM CSR PT FREEPORT INDONESIA DIBIDANG EKONOMI

Oleh Deliza Magdalia Faruwu

BAB I. PENDAHULUAN

- **Latar Belakang**

Industri pertambangan sering dipersoalkan sebagai pihak yang bertanggung jawab menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia (Jenkins & N. Yakovleva 2006: 272). Sehingga pertambangan global telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki citra negatifnya sebagai penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Salah satu upaya yang menonjol adalah program yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Namun, keberadaan CSR yang dibuat oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di industri pertambangan tersebut masih menjadi materi perdebatan. Perdebatan panjang tentang kedudukan CSR antara lain berkaitan dengan apakah CSR merupakan tanggung jawab moral perusahaan yang bersifat tidak wajib (volunteer) atau tanggung jawab hukum yang bersifat wajib (mandatory).

Bagi perusahaan CSR dirancang oleh perusahaan sebagai bagian integral dari strategi public relations-nya. Pihak di luar perusahaan (LSM), termasuk pemerintah melihat bahwa CSR selain merupakan kewajiban moral serta sosial, juga harus diwajibkan secara hukum. *Corporate Social Responsibility* di Indonesia, diatur menurut Undang-Undang PT (Perseroan Terbatas) no 40 dalam Pasal 74 lalu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP CSR). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengharuskan para pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pengembangan masyarakat (*community development*).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini akan membahas mengenai Penerapan *Community Development* dalam Program CSR PT Freeport Indonesia dibidang ekonomi. Penelitian ini dimulai dari pemaparan program CSR PTFI di bidang ekonomi, lalu akan disajikan hasil analisis dari program CSR yang menerapkan *community development*.

- **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah disetiap program CSR PT Freeport Indonesia dibidang ekonomi dilakukan tahapan terencana?
2. Bagaimanakah bantuan teknis yang diberikan PT Freeport Indonesia disetiap program CSR dibidang ekonomi?
3. Apakah terjadi pemetaan potensi masyarakat lokal disetiap program CSR PT Freeport Indonesia dibidang ekonomi ?
4. Apakah disetiap program CSR PT Freeport Indonesia dibidang ekonomi mengupayakan partisipasi aktif dari masyarakat lokal?

- **Tujuan**

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pada program CSR PT Freeport Indonesia dibidang ekonomi dilakukan tahapan terencana atau tidak
2. Untuk mengetahui bantuan teknis yang diberikan PT Freeport Indonesia disetiap program CSR dibidang ekonomi
3. Untuk mengetahui dilakukan atau tidak pemetaan potensi disetiap program CSR PT Freeport Indonesia dibidang ekonomi.
4. Untuk mengetahui diupayakan atau tidak partisipasi aktif dari masyarakat lokal disetiap CSR PT Freeport Indonesia dibidang ekonomi

- **Metode Penelitian**

Penelitian ini didasarkan pada pengalaman dan pengamatan peneliti selama melakukan internship di PTFI selama 40 hari sejak Februari-April 2015. Penelitian ini mendeskripsikan penerapan *community development* pada salah satu program CSR PTFI, yakni dibidang ekonomi.

Peneliti mengikuti segala kegiatan di tiap section yang ada di PTFI dalam melakukan program CSr dibidang ekonomi. Peneliti melakukan studi kepustakaan melalui dokumen, pngamatan langsung dilapangan dan wawancara denga karyawan PTFI, para pengusaha binaan, masyarakat lokal dan karyawan pengusaha binaan.

- **Kerangka Konsep**

1. Corporate Social Responsibility

CSR di Indonesia adalah definisi Suharto (2006) yang menyatakan bahwa CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk membangun sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Dari definisi tersebut, dapat kita lihat bahwa salah satu aspek yang dalam pelaksanaan CSR adalah komitmen berkelanjutan dalam mensejahterakan komunitas lokal masyarakat sekitar.

2. Community Development

Dunham seorang pakar *community development* (dalam Suharto, 1997: 99) *merumuskan community development* adalah usaha-usaha yang terorganisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, dan mengembangkan masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri. Pembangunan masyarakat bekerja terutama melalui peningkatan dari organisasi-organisasi swadaya dan usaha-usaha bersama dari individu-individu di dalam masyarakat, akan tetapi biasanya dengan bantuan teknis baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi sukarela.

Lebih lanjut Dunham mengemukakan 4 (empat) unsur-unsur *community development* sebagai berikut :

- suatu program rencana dengan suatu fokus pada total kebutuhan masyarakat desa/ kampung
- bantuan teknis
- pengintegrasian berbagai kekhususan untuk bantuan masyarakat
- suatu penekanan utama atas bantuan diri dan partisipasi masyarakat

3. Community Development dalam peranan Corporate Social Responsibility

Konsep tentang *Community Development* (Comdev) berhubungan dengan studi *Coorporate Social Responsibility* (CSR), terkadang antara keduanya cenderung disamakan oleh banyak orang, padahal dari konsep sendiri, ada perbedaan yang akan sangat berpengaruh pada tataran penerapannya sendiri di lapangan. Selanjutnya dibawah ini akan kami bedakan antara konsep dari Comdev dan CSR.

Pada beberapa hal, *community development* dapat juga didefinisikan sebagai penguatan potensi dan peran masyarakat untuk meraih potensi individu melalui pengorganisasian kelompok masyarakat untuk bertindak secara kolektif guna mengontrol kebijakan, proyek, program, dan kebijakan dengan mengefektifkan peran individu-individu dalam masyarakat. Perkembangan CSR tidak bisa terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Definisi pembangunan berkelanjutan menurut *The World Commission On Environment and Development* yang lebih dikenal dengan *The Brundtland Comission*, bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka (Solihin: 2009).

Pengenalan konsep *sustainability development* memberikan dampak kepada perkembangan devinisi dan konsep CSR selanjutnya. Sebagai contoh *The Organization for economic cooperation and Development* (OECOMDEV) merumuskan CSR sebagai “Kontribusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan serta adanya perilaku korporasi yang tidak semata-mata menjamin adanya pengembalian bagi pemegang saham, upah bagi para karyawan, dan pembuatan produk serta jasa bagi para pelanggan, melainkan perusahaan bisnis juga harus meberi perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta nilai-nilai masyarakat”.

Lembaga lain yang memberikan rumusan CSR sejalan dengan konsep *sustainability development* adalah *The World Business Council for Sustainability Development*. Menurut organisasi ini CSR adalah komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup dari para ekerja dan keluarganya demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat secara luas (Solihin : 2009).

BAB II. DESKRIPSI PERUSAHAAN

Awal berdirinya PT. Freeport Indonesia bermula saat seorang manajer eksplorasi Freeport Minerals Company, Forbes Wilson, melakukan ekspedisi pada tahun 1960 ke Papua. Ekspedisi Wilson dilakukan setelah ia membaca sebuah laporan tentang ditemukannya Ertzberg (Gunung Bijih, sebuah cadangan mineral) oleh seorang geolog Belanda, Jean Jacques Dozy, pada tahun 1936. PT Freeport menandatangani kontrak karya pertama dengan Pemerintah Indonesia bulan April 1967. Konstruksi skala besar baru dimulai pada bulan Mei 1972. Setelah para geolog menemukan cadangan kelas dunia Grasberg pada tahun 1988, operasi PT Freeport Indonesia menjadi salah satu proyek tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Akhir tahun 1991, Kontrak Karya kedua ditandatangani dan PT Freeport Indonesia diberikan hak oleh Pemerintah Indonesia untuk meneruskan operasinya selama 30 tahun.

Masalah ini datang dalam bentuk protes dari masyarakat Amungme dan Kamoro, terutama berasal dari suku Amungme. Bagi masyarakat Amungme dan Kamoro menghormati alam menjaga mereka dari kehancuran. Sehingga kedua suku ini sangat menjaga harmoni dari ketiga unsur, yakni manusia, lingkungan dan roh nenek moyang. Sehingga, keberadaan PT Freeport Indonesia menjadi ancaman untuk mereka.

Suku Amungme adalah penduduk asli di sekitar lokasi pertambangan PT Freeport Indonesia di daerah Tembagapura (mendiami dataran rendah). Suku Amungme adalah pemilik hak ulayat, dan diakui menurut undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang hal Agraria. Hal ini tidak bisa dipungkiri, bahwa suku Amungme telah menduduki selama beberapa generasi, daerah sekitar Waa Valley, yang telah menjadi daerah pertambangan emas dan tembaga PT Freeport Indonesia. Sedangkan suku Kamoro, adalah masyarakat yang tinggal di dataran rendah hingga ke pesisir selatan Timika. Beberapa suku Kamoro yang tinggal di sekitar aliran sungai Otomona dan Minarjewi pun harus berpindah dikarenakan menjadi batas pengelolaan tailing yang telah disetujui pemerintah Indonesia.

Selain beberapa keluhan dari kedua suku besar tersebut, menurut Tom Beanal, salah satu tokoh Amungme, Amungme dan Kamoro berusaha untuk membela hak-hak mereka dengan memberikan tuntutan mereka kepada PT. Freeport Indonesia melalui surat, pernyataan publik, dan wawancara media

BAB III. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

- **Program Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

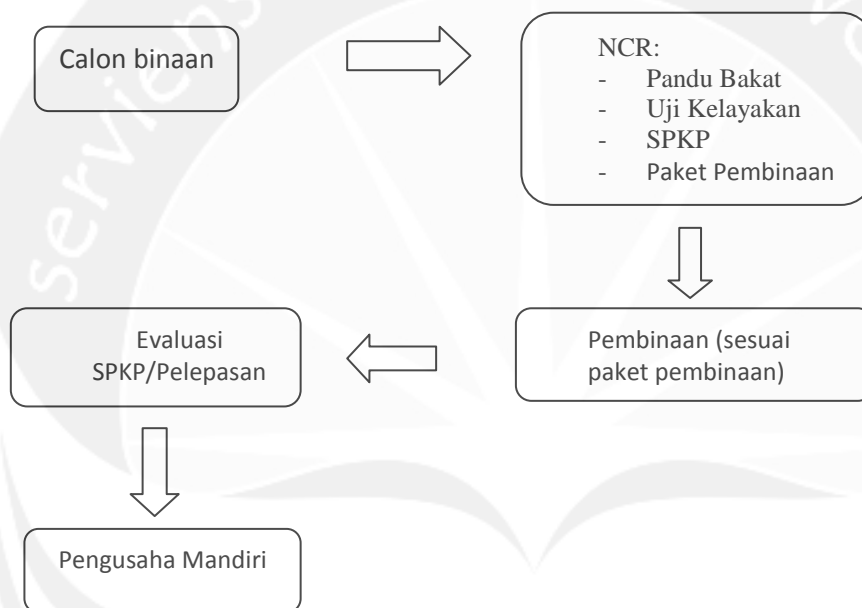
Program pembinaan UMKM di PTFI ini sudah berlangsung lama yaitu sejak pertengahan 1996. Program ini juga sudah mengalami beberapa pergantian nama, berawal dari program inkubator hingga sekarang program pembinaan UMKM. Program ini mengupayakan putera Papua terkhususnya 7 suku di Timika untuk menekuni dunia bisnis untuk menjadi pengusaha.

Pengusaha binaan dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki dalam menjalani usaha melalui program pelatihan yang dilakukan secara berkala. PTFI juga bekerjasama Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) untuk mendukung program pengembangan ekonomi untuk menumbuhkan usaha-

usaha baru yang berkelanjutan yang dijalankan oleh masyarakat Papua di sekitar perusahaan.

Program pengembangan ekonomi ini untuk individu, targetnya untuk para pengusaha asli dari Papua yang berdomisili di Timika, terutama untuk 2 suku asli dan 5 suku kerabat. Presentase terbesar peserta binaan berdasarkan suku oleh suku Amungme sebesar 22%, lalu 19 % untuk suku Kamoro. Para calon binaan ini akan diseleksi terlebih dahulu sebelum menjadi peserta PP-UMKM. Selain diseleksi melalui *New Customer Relation* (NCR), para peserta juga akan di uji pandu bakat untuk mengetahui kebutuhan peserta. Fasilitas yang diberikan kepada peserta berupa pelatihan, pembinaan, dan dana bergulir. Bagi para calon peserta/binaan yang ingin bergabung pada program pembinaan UMKM ini, harus melewati beberapa tahap:

Gambar 1. Alur PP-UMKM



Para peserta pengusaha, selain diberikan pembinaan mengenai kewirausahaan seperti pembukuan, penghitungan proyek atau usaha, peserta juga diberikan berbagai pelatihan. Pada program pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, selain memberikan pelatihan dan pembinaan tentang kewirausahaan, peserta juga melatih dan mendampingi para pengusaha untuk belajar menjalin kerjasama dengan Bank melalui dana bergulir yang dijalankan oleh YBUM. Yayasan Bina Utama Mandiri (YBUM) yang dibuat PT Freeport Indonesia untuk memberi pinjaman dana bergulir dengan bunga yang sangat kecil kepada para pengusaha binaan. YBUM menyalurkan pinjaman pinjaman dana bergulir bagi pengusaha lokal yang belum memenuhi syarat untuk melakukan pinjaman ke bank.

Selain memberikan pinjaman, pengusaha juga diberikan pembelajaran mengenai perbankan lewat kegiatannya meminjam di YBUM. Harapannya para pengusaha ini bisa menjadi kreditur yang layak di perbankan. Masing-masing jenis usaha baik mikro, kecil dan menengah diberikan 5 kali kesempatan meminjam di YBUM dengan besaran yang berbeda sesuai dengan UU mengenai UMKM.

Peminjaman uang ini akan dicicil selama 18 bulan dengan bunga 5% dalam setahun. Bunga ini sebagai salah satu bentuk didikan kepada pengusaha.

YBUM juga memiliki data laporan terhadap peminjamnya. YBUM menggolongkannya menjadi usaha lancar, perlu perhatian, kurang lancar dan usaha mati. Diharapkan, melalui program dana bergulir ini peserta memahami prosedur dan persyaratan untuk mengajukan pinjaman dari bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Selain memberikan pembinaan, pelatihan dan dana bergulir, PP-UMKM PT Freeport Indonesia memberikan program pengembangan perempuan dalam bidang ekonomi. Tujuan dari program ini untuk memberikan ketrampilan bagi ibu rumah tangga sehingga dapat berperan dalam peningkatan pendapatan keluarga dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan dalam rumah tangga. Kegiatan Pengembangan ini berupa usaha mikro seperti kios dan koperasi serta usaha berskala kecil menengah. Presentase pengusaha perempuan sebesar 36% dari total pengusaha di PP-UMKM. Sebagian besar jenis usaha yang dikelola adalah kios, yang tersebar di 4 daerah SP 1 & 4, SP 12 & 6, Kwamki Narama dan Koprapoka.

Keempat unsur comdev yang dikemukakan Dunham adalah tindakan yang membantu orang untuk mengenali dan mengembangkan kemampuan dan potensi mereka dan mengorganisir diri untuk menanggapi masalah dan kebutuhan yang mereka. Mendukung pembentukan komunitas yang kuat yang mengontrol dan menggunakan aset untuk mempromosikan keadilan sosial dan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Apabila peneliti cermati dari PP-UMKM ini, PT Freeport Indonesia belum menerapkan keempat unsur community yang dikemukakan oleh Dunham.

PT Freeport Indonesia belum melakukan unsur pertama dari Dunham untuk PP-UMKM ini. Unsur pertama pelaksanaan comdev harus dilakukan tahap demi tahap. Pada tahap awal dilakukan perencanaan hingga sampai pada tahap tindak lanjut dan evaluasi. Unsur pertama ini akan berkaitan dengan unsur ketiga yang dikemukakan Dunham. Program yang menerapkan Community Development berarti kegiatan itu dilaksanakan secara terorganisir dan dilaksanakan tahap demi tahap dimulai dari tahap permulaan sampai pada tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi - *follow-up activity and evaluation*. Memfokuskan kegiatan melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip *to help the community to help themselves*.

Namun hal ini tidak dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Tahapan awal mengenai perencanaan program/proyek harusnya melibatkan masyarakat 7 suku dalam hal ini bisa diwakilkan dari tetua adat dan kepala suku. Harus terjadi dialog antara perwakilan masyarakat dan perusahaan dalam merancang program ini agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menjadi catatan penting dalam unsur ketiga Dunham, seluruh tahapan ini harusnya melibatkan masyarakat asli. Masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam tahap perencanaan ini karena mereka mengetahui betul apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Kebutuhan dari masyarakat Amungme akan berbeda dengan kebutuhan masyarakat Kamoro, begitu pula dengan suku kerabat dan suku Papua lainnya. Sehingga, seharusnya setiap programnya akan berbeda sesuai kebutuhan dari masing-masing suku. Hal ini berdampak pada kelangsungan program.

Peneliti melihat program ini tidak melalui tahap perencanaan karena program tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kewirausahaan adalah konsep baru bagi masyarakat lokal Timika dan 5 suku kerabat, hanya beberapa dari 7 suku tersebut dan suku Papua lainnya yang mengenal pasar dalam skala kecil. Akibatnya para peserta mengalami kesulitan dalam menjalankan program ini.

Selain tidak adanya tahap perencanaan, PTFI juga tidak melaksanakan evaluasi dalam PP-UMKM. Evaluasi ditujukan baik kepada pelaksanaan program (proses dan hasil), maupun kepada masyarakat. Walaupun dalam proses pelaksanaan program PP-UMKM ini para pembina dan karyawan PTFI melakukan *report* mingguan dan bulanan. Setiap tahunnya PTFI melakukan sosialisasi dengan para pengusaha binaan untuk membahas kendala-kendala dari para peserta dan pembina selama setahun. Pembahasan dalam sosialisasi ini masih umum hal ini dikarenakan jumlah pesertanya yang cukup banyak. Namun hal ini belum bisa dikatakan sebagai tahap evaluasi. Evaluasi ini pun harus melibatkan pengusaha agar mereka sendiri tahu perkembangan mereka. Ada baiknya, evaluasi ini dilakukan dengan FGD agar segala permasalahan dari semua peserta dan pembina dapat diakomodir.

Banyak permasalahan pun muncul dari PP-UMKM ini akibat tidak adanya tahap perencanaan dan evaluasi serta pemetaan kebutuhan masyarakat. Masalah yang timbul, seperti:

- Program ini dalam beberapa kasus sebagai strategi PTFI dalam menghadapi tuntutan masyarakat. Kasus seperti ini tidak akan melewati alur PP-UMKM sebagaimana mestinya, melainkan melalui jalur khusus. Biasanya hal ini dapat terjadi bila salah satu ketua adat/keluarganya melakukan aksi protes.
- Beberapa peserta tidak memiliki kemampuan dasar berhitung dan membaca, selain itu sebagian besar peserta binaan tidak memiliki kemampuan dasar dalam berwirausaha. Sehingga karyawan PTFI, selaku pembina yang memiliki porsi besar dalam menjalankan usaha binaannya tersebut
- Tidak ada indikator kemandirian yang jelas dalam meluluskan pengusaha binaan (terlihat masih banyak pengusaha yang tergantung pada pembina), sehingga para peserta binaan ini menjadikan PTFI sebagai user dari usaha mereka.

PP-UMKM dari PTFI masih menggunakan pola program *top-down intervention* yang tidak menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya. Program dibuat dari atas kebawah, maksudnya program ini tidak berasal dari masyarakat sendiri melainkan dari pihak PTFI. Masyarakat 5 suku belum dilibatkan secara aktif dalam program ini. Sehingga terlihat jelas bahwa program ini menggunakan metode kerja *doing for*. Metode ini akan menjadikan masyarakat menjadi pasif, kurang kreatif dan tidak berdaya, bahkan mendidik mereka untuk bergantung pada PT Freeport Indonesia. Hal ini yang menyebabkan para peserta binaan bergantung pada keberadaan pembinanya.

Kedua unsur lainnya mengenai bantuan yang diberikan berupa bantuan teknis agar dapat melibatkan masyarakat lokal "*to improve*" kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Kedua unsur

ini memberikan penekanan pada prinsip kemandirian. Artinya partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama komunitas di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat.

Bantuan yang diberikan oleh pembina bukan merupakan bantuan teknis. Pembina terlibat lebih jauh dari hal teknis. Contoh kecilnya, dalam melakukan riset usaha dari peserta masih dilakukan oleh pembina, pembukuan serta pengelolaan uang masih dilakukan pembina. Hingga mencari konsumen pun dilakukan pembina bahkan PTFI menjadi konsumen atau user dari usaha para peserta program. Hal ini jelas mematikan kemandirian dari para peserta. Pembina menjadi lebih aktif dalam memecahkan permasalahan usaha peserta. Misalnya kredit dari YBUM yang macet, kerugian hingga masalah internal dari CV/ perusahaan peserta binaan.

Melalui hasil analisis di atas, PTFI belum menerapkan comdev dalam PP-UMKM. Program ini sudah lama dilakukan oleh PTFI sejak tahun 1996. Program ini dulu adalah program inkubator. Namun hingga saat ini permasalahan yang dihadapi masih sama, yakni kurangnya kemandirian dan kemampuan berwirausaha dari peserta binaan. Belum terlihat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi yang mereka miliki. Sehingga perlu adanya evaluasi untuk keberlanjutan program ini.

- **Village Based Development**

Berbeda dengan section PP-UMKM yang ditujukan untuk individu, section *village based development* ini adalah program pengembangan ekonomi berbasis desa, dalam hal ini dilakukan untuk pengembangan terhadap desa-desa di Timika. Program ini bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam di sekitar mereka. Program ini dijalankan dengan mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat serta dipadukan dengan kearifan lokal setempat.

Pada VBD terdapat 3 grup, yaitu: pertama CED (*Costal Economic Development*) melakukan pengembangan untuk masyarakat pesisir pantai, yakni 5 desa di pesisir. Kedua LED (*Lowland Economic Development*) melakukan pengembangan ekonomi untuk masyarakat yang berada di dataran rendah seperti peternakan ayam, inseminasi buatan untuk babi dan perkebunan coklat. Ketiga, HAD (*highland Agricultrul Development*) melakukan pengembangan untuk masyarakat di dataran tinggi dan 3 desa di gunung melalui program kopi Amungme Gold.

Tidak seperti PP-UMKM, pada program VBD (*Village Based Community*) terlihat PTFI telah melakukan beberapa dari keempat unsur yang dikemukakan oleh Arthur Dunham. PTFI dalam hal ini karyawan di section VBD telah melakukan pemetaan potensi dari masing-masing suku di mimika, terutama pada suku Amungme dan Kamoro. Program yang dilakukan di VBD memfokuskan kegiatannya melalui pengembangan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Prinsip *to help the community to help themselfe* telah menjadi kenyataan.

Community development sebagai salah satu model pendekatan pembangunan (*bottoming up approach*) merupakan upaya melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber daya lokal yang ada. Dalam pengembangan masyarakat hendaknya diperhatikan bahwa masyarakat punya tradisi, dan punya adat-istiadat, yang kemungkinan sebagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai modal sosial.

Setiap masyarakat memiliki faktor-faktor sosial dan ekonomi, yakni nilai dan norma serta adat-istiadat yang mengikat pada kehidupan mereka. Hal-hal yang mengatur relasi dan interaksi sosial masyarakat. Hal ini pun berlaku pada suku Amungme dan Kamoro. Pada Program VBD dibagi dalam beberapa sub program sesuai dengan lokasi dan kegiatan ekonomi masing-masing suku.

Bentuk pengembangan berbasis desa yang diberikan adalah memberikan rekomendasi komoditas pertanian unggulan sesuai dan memberikan pelatihan dan penyuluhan. Kedua, merangsang partisipasi masyarakat dalam melakukan pertanian menetap dengan memberikan sarana produksi pertanian dan demplot percontohan. Ketiga, memfasilitasi pemasaran hasil pertanian.

Berangkat dari hasil analisis diatas, maka peneliti membuat tabel untuk melihat sub program mana saja yang telah melakukan empat unsur comdev yang dikemukakan Dunham, maka hasil dari analisis tersebut:

Tabel 1. Program VBD

	Empat Unsur Comdev Dunham			
	Tahapan Terencana	Bantuan Teknis	Pemetaan potensi	Kemandirian
HAD				
<i>Highland Agriculture Development</i>				
Watani Kopi "Amungme Gold"				
LED				
<i>Lowland Economic Development</i>				
Peternakan, Inseminasi Buatan & <i>Cacao Clinic</i>				
CED				
<i>Costal Economic Development</i>				
Perikanan, Tanaman Hortikultura & pabrik Sagu				

Ket:  memiliki unsur comdev milik Dunham

BAB IV. PENUTUP

Pada akhirnya, merangkum dari hasil penelitian ini, PT Freeport Indonesia dalam menerapkan program CSR lebih dilihat sebagai suatu strategi bisnis untuk membangun citra positif perusahaan dengan memberikan sejumlah bantuan. Perusahaan berusaha menyamarkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan operasionalnya. Keuntungan yang diambil oleh PT Freeport tidak sebanding dengan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat 7 suku terutama 2 Suku asli Amungme dan Kamoro, walaupun dalam pelaksanaannya PTFI sudah berupaya mengurangi dampak lingkungan namun belum berhasil dalam kesejahteraan masyarakatnya.

Kesejahteraan masyarakat 7 suku belum dapat terwujud karena PT Freeport Indonesia belum melakukan penerapan *community development* dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa program PTFI yang belum menerapkan 4 unsur comdev Dunham. PP-UMKM mengupayakan kewirausahaan atau UMKM sebagai salah satu penggerak pembangunan, namun perlu diingat kembali lagi bahwa comdev adalah “suatu proses” pembangunan yang berkelanjutan melalui pengembangan masyarakat yang mandiri dilakukan secara terorganisir. Evaluasi perlu dilakukan dalam setiap tahapan program, untuk melihat keempat unsur comdev yang dikemukakan oleh Dunham.

Program-program yang dilakukan di section *Village Based Development*, dua program diantaranya telah memenuhi keempat unsur tersebut, yaitu CED dengan program ketahanan pangan dan tanaman hortikultura serta pabrik sagu dan HAD dengan program watani kopi. Sedangkan program lain yakni LED yang dilakukan di Utikini Baru belum menerapkan 4 unsur comdev Dunham.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam menganalisis konsep *community development*, perlu menambah data tanggapan dari masing-masing suku terhadap program CSR PT Freeport Indonesia, indikator keberhasilan dari program CSR dengan penerapan *community development*. Sehingga, menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya untuk bisa mengevaluasi program CSR PT Freeport Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Asy'ari, Hasan. 2009. Implementasi Corporate Social responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT. Newmont. [Online] 2009. [Cited: Januari 22, 2016.] eprints.undip.ac.id/17529/1/HASAN_ASY'ARI.pdf.

Achwan, Rochman. 2013. *Sosiologi Ekonomi di Indonesia*. Jakarta : UI Press

Broomhil, Ray. 2007. *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: KEY ISSUES AND DEBATES*. Australia : Dunstan Paper

Budimanta, A. Prasetijo A and Rudito, B. 2008. *CCSR Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta : ICSD

Koestoer, Yanti. 2007. *Corporate Social Responsibility in Indonesia: Building Internal Corporate Values to Address Challenges in CSR Implementation*

Daniri, Achmad. 2007. Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. [Online] 2007. [Cited: September 18, 2015.] www.kadin-indonesia.or.id.

Ife, Jim and Tesoriero, Frank. 2008. *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Edisi 3.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Jenkins, Heledd and Yakovleva, Natalia. 2006. *Corporate Social Responsibility in The Mining Industry: Exploring Trends in Social and Environmental Disclosure.* United Kingdom : Jurnal of Cleaner Production

Kafiar, August and Beanal, Tom. 2000. *PT Freeport Indonesia dan Masyarakat Adat Suku Amungme.* s.l. : Forum Lorentz

Mentari, Rury Atmi. 2013. IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PENDIDIKAN. [Online] 2013. [Cited: 1 22, 2015.] ejournal.unesa.ac.id/article/8593/57/article.pdf.

Mulyadi Sumarto. [Online] Agustus 2007, 7. [Cited: April 11, 2016.] <http://mulyadism.staff.ugm.ac.id/reviews/corporate-social-responsibility/> .

Nawawi, Hadiri. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Oktaviani, Rachmawati Meita. 2012. *Corporate Social Responsibility dan Strategi Perusahaan: Presepektif Pendekatan Kualitatif (Studi Kasus Pada PT APAC Inti Corpora Bawean).* Semarang : Universitas STIKUBANK

PT Freeport Indonesia. 2014. *Laporan Tahunan 2013.* TIMIKA : PARID

Rahmatullah and Kurniati, Trianita. 2011. *Paduan Praktis Pengelolaan CSR.* Yogyakarta : Samudra Biru

Sharma, Deepankar and Bhatnagar, Priya. 2013. *Corporate Social Responsibility Of Mining Industries.* s.l. : National Law University, Jodhpur

Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Solihim, Ismail. 2008. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability.* Jakarta : Salemba Empat

Sudarsono and Edilius. 2005. *Koperasi: Dalam Teori dan Praktek.* Jakarta : Renika Cipta

Sugiarto, et al. 2007. *Ekonomi Mikro:Sebuah Kajian Komprehensif.* Jakarta : Gramedia

Sugiyanto. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan; Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung : Alfabeta

Suhadi, Antonius, Febrian, AR and Turatmiyah, Sri. 2014. *Model CSR Perusahaan Tambang Batu Bara Di Kabupaten Lahat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*. Palembang : Universitas Sriwijaya

Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial Dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS

Susanto, A.B. 2007. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : The Jakarta Consulting Group

Untung, Hendrik. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Sinar Grafik

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

